

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DATA FISIK SERTIFIKAT HAK
ATAS TANAH YANG POSISINYA TERTUKAR
(MEDIASI OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
SUKOHARJO)**



Disusun Sebagai Salahsatu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

RIZAL HERDIANTO

C 100130220

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DATA FISIK SERTIFIKAT HAK
ATAS TANAH YANG POSISINYA TERTUKAR
(MEDIASI OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
SUKOHARJO)**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

RIZAL HERDIANTO
C 100130220

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Dosen Pembimbing



(Darsono S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DATA FISIK SERTIFIKAT HAK
ATAS TANAH YANG POSISINYA TERTUKAR
(MEDIASI OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
SUKOHARJO)**

Yang ditulis oleh:

RIZAL HERDIANTO

C 100130220

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal: 19 April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Ketua : Darsono S.H.,M.Hum

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H.,M.H.,C.N

Anggota : Inayah, S.H., MH.

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

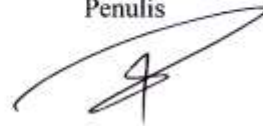
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 April 2017

Penulis



RIZAL HERDIANTO

C100130220

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DATA FISIK SERTIFIKAT HAK
ATAS TANAH YANG POSISINYA TERTUKAR
(MEDIASI OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
SUKOHARJO)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo dalam upaya perwujudan peran Pengelolaan, pengkajian, dan penanganan perkara pertanahan serta kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaian secara mediasi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, menggambarkan secara rinci apa yang ditemukan dalam penelitian. Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan lingkup Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo bagian sub seksi, sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, sehingga memperoleh suatu gambaran yang sudah ada untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

Kata Kunci: *Badan Pertanahan Nasional, Sengketa Pertanahan, Upaya penyelesaian sengketa, mediasi.*

ABSTRACT

This study aims to determine how the process of settlement of land disputes in mediation by the National Land Agency Sukoharjo district in an effort embodiment of the role of management, assessment and case management of land Cases as well as any obstacles that faced in the process of mediation in the settlement of the National land Agency Sukoharjo district. This research is descriptive, describing in detail what was found in the study. Based on this research goal is juridical empirical research with qualitative approach that produces descriptive data analysis. Data collected by interviews with the scope of Sukoharjo District Land Office Employees section subsections, disputes, conflicts, and the case of land so as to obtain an image that already exists to answered problems.

Keywords: *Land Affairs Office, Land Affairs dispute, Attempt of dispute settlement, Mediation*

1. PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia. Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk

mempertahankan tanah yang dimilikinya.¹ Pada dasarnya sumber konflik pertanahan sekarang ini sering terjadi antara lain disebabkan oleh:² (1) Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata; (2) Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian; (3) Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah; (4) Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat); (5) Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah; (6) Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat.

Dalam penguasaannya untuk menggunakan serta memanfaatkan tanah tersebut sering kali timbul sengketa antar pemegang hak yang satu dengan yang lain. Sehingga untuk membuktikan status kepemilikan yang sah atas penguasaan tanah tersebut dibutuhkan adanya suatu sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut serta tidak ada batas waktu kepemilikannya dan sertifikat ini dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa salah satu tugas BPN adalah menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik dibidang pertanahan. Lebih lanjut tentang fungsi BPN dalam menangani masalah pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan

¹ Mochammad Tauhid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, hal. 3.

² Lutfi I Nasoetion, 2002, *Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria*, Bandung: Yayasan AKATIGA, hal. 112.

ini bertujuan memberikan kepastian hukum akan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 c Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang antara lain, mengatakan bahwa Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 memperlihatkan kebijakan pemerintah untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk penyelesaian sengketa pertanahan namun tidak ada ketentuan hukum yang rinci penggunaan mediasi dalam konteks sengketa pertanahan. Ketentuan yang ada hanya berbentuk Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional No. 05/Juknis/D.V/2007.³

Sengketa pertanahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini adalah sengketa data fisik, sertifikat hak atas tanah yang terletak di sebelah barat adalah keliru atau salah posisi dengan lokasi yang seharusnya ditimur, namun di sebelah timur telah diduduki pihak lain, ini menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak yang masing-masing memegang sertifikat hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu: (1) Bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa data fisik (sertifikat hak atas tanah yang posisinya tertukar) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari kedudukan, tugas dan fungsi BPN menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011? Dan (2) Hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa data fisik secara mediasi (Sertifikat hak atas tanah yang posisinya tertukar) di kantor pertanahan Kabupaten Sukoharjo tersebut? Serta bagaimana solusinya?

³ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal 66.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa data fisik sertifikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di BPN Sukoharjo ditinjau dari kedudukan, tugas dan fungsi BPN menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 dan (2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi saat proses penyelesaian sengketa di BPN Sukoharjo.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) manfaat teoritis, untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah); (2) manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu pada penelitian hukum empiris. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁵ Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 51.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses mediasi penyelesaian sengketa data fisik (sertifikat hak atas tanah yang posisinya tertukar) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari kedudukan, tugas dan fungsi BPN menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, dibentuk Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten atau Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi. Sebagaimana yang dimuat didalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa salah satu tugas BPN yaitu menyelenggarakan fungsi Pengkajian dan Penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. Kemudian Diatur lebih lanjut Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

3.2 Sengketa Data Fisik Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Posisinya Tertukar Yang Di Tangani Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo.

Banyaknya sengketa pertanahan yang terdaftar dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sengketa pertanahan. Dari wawancara dengan bapak sigit pada tahun 2016 tercatat sebanyak 70 perkara pertanahan yang didaftarkan di BPN kabupaten Sukoharjo dan didominasi dengan sengketa waris. Salah satu sengketa pertanahan yang dijadikan sebagai bahan

penelitian ini adalah sengketa data fisik, sertifikat hak atas tanah yang terletak di sebelah barat adalah keliru atau salah posisi dengan lokasi yang seharusnya ditimur, namun di sebelah timur telah diduduki pihak lain, yang disebut terlapor. Sengketa data fisik terjadi di Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo antara Ny Sri Yatinah pemilik sertifikat HM No. 1379/Kenep dengan Ny Sumiyem Giyanto Sudarmo pemilik sertifikat HM No. 1380/Kenep.

Apabila terjadi sengketa terhadap data fisik tanah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

3.3 Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah

Bapak Siswandi, S.iT selaku Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Sukoharjo menjelaskan bahwa terhadap suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, solusi penyelesaian dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus yaitu pengaduan disampaikan melalui loket pengaduan, kemudian dilakukan pendaftaran terhadap pengaduan yang diterima. (2) Pengkajian kasus yaitu menganalisis data yang ada dan menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus. (3) Penanganan Kasus yaitu pengolahan data pengaduan, penyiapan berita acara atau gelar kasus (4) Penyelesaian kasus, dikelompokkan menjadi 2 yaitu melalui jalur pengadilan dan melalui proses mediasi.⁶

⁶ Siswandi, Kepala sub. Seksi sengketa dan konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 30 September 2016, Pukul 10.00 WIB.

3.3.1 Pengkajian Sengketa Data Fisik Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Posisinya tertukar.

Kepala Seksi sengketa konflik dan perkara pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo mengkaji dan meneliti sengketa data fisik sertifikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan penelitian dan menganalisis data-data yang diterima dari para pihak. Hasil penelitian dan analisa data ini untuk menentukan dan merumuskan pokok permasalahan agar dapat mengetahui solusi penyelesaian. Pokok permasalahan dilakukan dengan menelaah hukum berdasarkan data yuridis dan data fisik dan atau data pendukung lainnya. Hasil telaahan dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi penanganan.⁷

3.4 Penanganan Sengketa Data Fisik Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Posisinya Tertukar Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo

Kepala Seksi sengketa konflik dan perkara pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam menangani masalah sengketa data fisik melakukan kegiatan penelitian dan pengolahan data pengaduan, yang dilakukan dengan: (1) Melakukan penelitian dan pengolahan data pengaduan (2) Penelitian Lapangan (3) Penyelenggaraan Gelar Kasus (4) Penyusunan Risalah Pengolahan Data (5) Penyiapan Berita Acara Mediasi (6) Monitoring dan Evaluasi terhadap Hasil Penangana Sengketa.

3.5 Proses Pelaksanakan dan Tahapan Penyelesaian Secara Mediasi

Tahapan gelar mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yaitu melalui tahapan-tahapan: Mengupayakan tahapan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan diluar badan Peradilan dan mempercepat upaya penyelesaian, konflik, dan perkara pertanahan melalui: Musyawarah

⁷ *Ibid*, Wawancara Pribadi.

dilakukan apabila para pihak yang bersengketa bersedia untuk saling terbuka dan berdialog.

Tahap pertama: Menciptakan forum, dalam tahap ini kegiatan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: (A) Rapat gabungan (B) Pernyataan pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah: (1) Mendidik para pihak (2) Menentukan pokok-pokok peraturan (3) Membina hubungan dan kepercayaan (C) Pernyataan para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah: (1) Dengar pendapat (2) Menyampaikan dan Klarifikasi informasi (3) Cara-Cara interaksi.

Tahap kedua: Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi, dalam hal ini kegiatan- kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat terpisah yang bertujuan untuk: (1) Mengembangkan informasi selanjutnya (2) Mengetahui lebih dalam informasi (3) Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya (4) Mendidik para pihak tentang cara tawar-menawar penyelesaian masalah. Tahap ketiga: Pemecahan masalah, dalam tahap ketiga yang dilakukan mediator mengadakan rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk: (1) Menetapkan agenda (2) Kegiatan Pemecahan masalah (3) Memfasilitasi kerja sama (4) Identifikasi dan klarifikasi isu masalah (5) Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan (6) Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya. Tahap keempat: Pengambilan keputusan, dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: (1) Rapat-rapat bersama (2) Melokalisasikan pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah (3) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan (4) Mengkonfirmasi dan klarifikasi (5) Membantu para pihak untuk memperbandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif (6) Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah (7) Mengusahakan formula pemecahan masalah berdasarkan “win-

win solution” dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dikalahkan (8) Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.⁸

3.6 Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa data fisik (Sertifikat hak atas tanah yang posisinya tertukar) di kantor pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dan solusinya

3.6.1 Hambatan Yang Timbul Dari Dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Intern)

Masih kurang nya sumber daya manusia yang memahami dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi. Hal ini diungkapkan bapak Siswandi bahwa Dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengelolaan, Pegkajian, dan Penanganan Sengketa Pertanahan Karena kurangnya mediator yang ada dalam Kantor Tersebut. Hanya terdapat beberapa orang saja yang mampu dan menjalankan tugas sebagai mediator.⁹

3.7 Hambatan Yang Timbul Dari Kedua Pihak Yang Bersengketa (Ekstern)

(1) Tidak ada itikad baik dari salah satu pihak yaitu dengan tidak hadirnya pihak tersebut, biasanya adalah pihak terlapor. Hal ini dapat menghambat untuk berjalannya proses mediasi, Karena pada dasarnya mediasi merupakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk nantinya menjelaskan kronologi masing-masing pihak dalam sengketa tersebut dan keinginan dari para pihak. (2) Mediasi Deadlock atau kebuntuan. Kedua belah pihak hadir dalam mediasi dan masing-masing telah menjelaskan kronologi sengketa dan keinginannya, namun kedua belah pihak dibantu mediator tidak dapat menghasilkan solusi yang memberi kepuasan sehingga sulit untuk menghasilkan

⁸ Sigit Cahya Kurniawan, Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 30 September 2016 Pukul 11.00 WIB.

⁹ Siswandi, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo, 30 September 2016, Pukul 11.00 WIB.

kesepakatan. Maka dari itu harus diagendakan pertemuan selanjutnya. Kendala dari emosi para pihak, yaitu salah satu pihak menyampaikan pendapat dengan emosi, sehingga memancing emosi pihak lain, yang menyebabkan musyawarah harus dihentikan sementara.¹⁰

3.8 Solusi yang dilaksanakan dan diberikan atas munculnya kendala atau hambatan tersebut

(1) melakukan pendekatan secara persuasif yaitu dengan memberikan pembinaan kepada para pihak yang bersengketa untuk tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan di pengadilan, akan tetapi sebaiknya terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. (2) Pihak kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo juga melaksanakan Pendekatan preventif yang mana pihak dari Kantor Pertanahan Sukoharjo aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan masyarakat mengenai gambaran pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam menyelesaikan suatu sengketa pertanahan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat dan mengantisipasi terjadinya perselisihan dan sengketa tanah. (3) Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo melaksanakan pelayanan publik Prona, yaitu kegiatan legalisasi asset yang lebih dikenal dengan Proyek Operasi Nasional Agraria.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Badan Pertanahan Nasional Kabupten Sukoharjo telah menjalankan tugas dan fungsinya, Hal ini terbukti dengan perannya yang telah melakukan Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan kasus sengketa pertanahan sebagai mediator, salah satunya dalam menyelesaikan masalah atau kasus Sengketa Data Fisik Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Posisinya Tertukar dasar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3

¹⁰ Siswandi, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo, 30 September 2016, Pukul 11.00 WIB.

Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai mediator telah melaksanakan gelar mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Petunjuk Teknis Nomor : 05/JUNKIS/DV/2007 tentang mekanisme pelaksanaan Mediasi.

Kedua, Tahapan prosedur penyelesaian sengketa tanah di BPN Kabupaten Sukoharjo yaitu Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus yaitu pengaduan disampaikan melalui loket pengaduan, kemudian dilakukan pendaftaran terhadap pengaduan yang diterima, dilakukan pengkajian kasus, penanganan kasus, dan Penyelesaian kasus.

Ketiga, Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam penyelesaian sengketa data fisik berperan dengan melakukan pengkajian sengketa, melakukan penanganan sengketa, dan melaksanakan gelar kasus. Dalam penyelesaian sengketa data fisik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah berhasil dilaksanakan mediasi musyawarah yang dihadiri oleh para pemegang hak dan perangkat kelurahan serta mediator oleh BPN kabupaten Sukoharjo.

Keempat, Dalam mengadakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan salah satunya dengan mediasi, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang terjadi, salah satunya ketidakhadiran salah satu pihak yang membuat terhambatnya jalannya mediasi dan terjadinya mediasi deadlock atau belum tercapainya kesepakatan. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo selaku mediator selalu berusaha untuk mengupayakan terwujudnya proses mediasi dengan dihadiri kedua belah pihak dengan melakukan pendekatan persuasif dan melakukan pendekatan prefentif. Hal ini dilakukan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara damai tanpa ada yang dirugikan dan tidak berujung melalui pengadilan.

4.2 Saran

Pertama, Pihak BPN Kabupaten Sukoharjo khususnya yang menjadi mediator sebaiknya lebih banyak memberikan alternatif dan saran ketika

sedang menengahi para pihak yang bersengketa. Mediator harus aktif dan berusaha semaksimal mungkin (tidak pasif) untuk mencari jalan keluar bagi para pihak dengan memberikan pilihan jalan tengah penyelesaian untuk ditempuh.

Kedua, Masyarakat harus lebih teliti dan memeriksa kembali sertifikat hak milik atas tanah yang dimiliki, mencocokkan data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam sertifikat.

Ketiga, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebaiknya lebih mengintensifkan sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran informasi kepada masyarakat bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi mediator ketika terjadi sengketa pertanahan, Pihak BPN juga dapat memberikan informasi mengenai layanan-layanan yang dapat diberikan dan dinikmati oleh masyarakat mengenai pertanahan.

Persantunan

Ucapan Terimakasih saya sampaikan kepada. *Pertama*, Orang tuaku tercinta Bapak Hartanto dan Ibu Yuli Hastuti yang selalu memberikan perhatian dan doanya. *Kedua*, Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi ijin penelitian dalam penyusunan naskah publikasi ini. *Ketiga*, Bapak Darsono, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan membetulkan dengan sikap sabar, sehingga penyusunan naskah publikasi ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nasoetion Lutfi I, 2002, *Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria*, Bandung: Yayasan AKATIGA, hal. 112

Rahmadi Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal 66

Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 51

Tauhid Mochammad, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, hal. 3

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria